UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Pola spasial perkembangan sosial ekonomi wilayah di kab. Sragen tahun 1990-2000
Dodi Widiyanto, Drs. R. Rijanta, M.Sc.; Andri Kurniawan, S.Si., M.Si.
Universitas Gadjah Mada, 2003 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Judul i
Halaman Pengesahan ii
Halaman Persembahan iii
Intisari iv
Abstract v
Kata Pengantar vi
Daftar Isi ix
Daftar Tabel xii
Daftar Gambar xvi
Daftar Lampiran xviii
Bab I. Pendahuluan 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Perumusan Masalah 3
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian 5
1.4. Kegunaan Penelitian 6
1.5. Tinjauan Pustaka dan PenelitianSebelumnya 6
1.6. Kerangka Pemikiran Penelitian 17
1.7. Hipotesa 20
1.8. Batasan Operasional 20
Bab II. Metode Penelitian 22
2.1. Pemilihan Daerah Penelitian 22
2.2. Cara Pengumpulan Data 22
2.3.Variabel Penelitian 24
2I.4. Unit Analisis Penelitian 26
2.5. Analisa Data 27
Bab III. Karakteristik Daerah Penelitian 39
3.1. Letak, Luas, dan Batas Wilayah 39
3.2. Kondisi Fisik 41
3.2.1. Topografi 41

Pola spasial perkembangan sosial ekonomi wilayah di kab. Sragen tahun 1990-2000
Dodi Widiyanto, Drs. R. Rijanta, M.Sc.; Andri Kurniawan, S.Si., M.Si.
Universitas Gadjah Mada, 2003 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

3.3.2.2. Geologi 42
3.3.2.3. Hidrologi 45
3.3.2.4. Tanah 47
3.3.2.5. Curah Hujan 48
3.3.2.6. Penggunaan Lahan 51
3.3. Sosial Ekonomi 53
3.3.1. Jumlah dan Kepadatan Penduduk 53
3.3.2. Perkembangan Penduduk 55
3.4. Jaringan Infrastruktur 55
3.4.1. Fasilitas Sosial Ekonomi 56
3.5. Sarana Transportasi 59
3.6. Produk Domestik Regional Bruto 63
Bab IV. Kebijaksanaan Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang di Kabupaten Sragen 61
4.1. Rencana Tata Ruang Jawa Tengah 61
4.1.1. Hirarki Kota 61
4.1.2. Wilayah Pembangunan 62
4.1.3. Arah Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Wilayah 63
4.2. Kebijaksanaan Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kabupaten Sragen 66
4.2.1. Struktur Pewilayahan 67
4.2.2. Pewilayahan Pembangunan 69
4.2.3. Hirarki Pusat-pusat Pengembangan 70
4.2.4. Strategi Pengembangan Wilayah 73
Bab 5. Hasil dan Pembahasan 77
5.1. Faktor Penentu Tingkat Perkembangan Sosial Ekonomi Wilayah 77
5.2. Distribusi Faktor-faktor Penyusun Tingkat Perkembangan Sosial Ekonomi Wilayah. 80
5.3. Dinamika Tingkat Perkembangan Sosial Ekonomi Wilayah di Kabupaten Sragen.....100
5.4. Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Variasi Tingkat

Pola spasial perkembangan sosial ekonomi wilayah di kab. Sragen tahun 1990-2000
Dodi Widiyanto, Drs. R. Rijanta, M.Sc.; Andri Kurniawan, S.Si., M.Si.
Universitas Gadjah Mada, 2003 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Perkembangan Sosial ekonomi Wilayah.....119

5.4.1. Analisis Variasi Tingkat Perkembangan Sosial Ekonomi Wilayah 119

5.4.2. Kesenjangan antarwilayah di Kabupaten Sragen.....120

5.4.3. Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Perkembangan Sosial Ekonomi Wilayah 123

5.4. Pola Spasial Perkembangan Sosial Ekonomi Wilayah di Kabupaten Sragen.....126

5.4.1. Pola Spasial Sosial Ekonomi Wilayah 126

5.4.2. Asosiasi Elemen-elemen dalam Ruang Pembentuk Pola Spasial Perkembangan Sosial Ekonomi Wilayah.....129

5.5Arahan Pengembangan Kabupaten Sragen 134

BAB VI. Kesimpulan dan Saran.....170

5.1. Kesimpulan.....170

5.2. Saran.....172

Daftar Pustaka.....174

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Pola spasial perkembangan sosial ekonomi wilayah di kab. Sragen tahun 1990-2000
Dodi Widiyanto, Drs. R. Rijanta, M.Sc.; Andri Kurniawan, S.Si., M.Si.
Universitas Gadjah Mada, 2003 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

BAB I
PENDAHULUAN

I.1.Latar Belakang.

Persebaran penduduk di Indonesia yang tidak merata, yaitu di Pulau Jawa yang luasnya ± 6 ½ % dari seluruh wilayah nasional dihuni oleh ± 65 % dari seluruh penduduk Indonesia, sehingga kepadatan penduduk di Jawa sangat tinggi sedangkan wilayah di luar Jawa penduduknya masih jarang. Berdasarkan hal tersebut dijumpai dualisme, yaitu Pulau Jawa mempunyai kelebihan Sumber Daya Manusia akan tetapi kekurangan Sumber Daya Alam, sedangkan wilayah di luar Pulau Jawa mempunyai Sumber Daya Alam yang berlimpah akan tetapi dari sisi Sumber Daya Manusia kekurangan. Kedua hal tersebut dianggap tidak menguntungkan bagi penduduk karena sebagian besar dari penduduk di Jawa tinggal di wilayah perdesaan yang sebagian besar penduduknya sebagian besar bertani. Umumnya wilayah perdesaan di Jawa mengalami permasalahan, yaitu penduduk yang rapat, pemilikan tanah yang kecil, kesempatan kerja yang kurang, terdapatnya pengangguran dan pengangguran tak kentara, pendapatan per kapita yang rendah dan sebagainya. Hal tersebut menyebabkan masalah lain, seperti tingkat kesehatan yang kurang baik, tingkat pendidikan yang rendah, tingkat ketrampilan yang kurang, tingkat prasarana sosial ekonomi kurang layak dan sebagainya. (Jayadinata, 1999)

Apabila dilihat dari aspek keruangan, potensi dari setiap wilayah pada kenyataannya tidaklah sama, baik dalam jenis potensi itu sendiri maupun jumlah dan kualitasnya. Keadaan ini akan mengakibatkan beda pertumbuhan antardaerah yang pada akhirnya dapat menyebabkan inefisiensi penggunaan sumberdaya pembangunan. Karena itu dalam pelaksanaan pembangunan daerah aspek keruangan merupakan pertimbangan utama sehingga pembangunan dapat terpenuhi baik dalam pemanfaatan maupun pelestarian sumberdaya pembangunan daerah (Hirschman dalam Suryanto,1994)

Pola spasial perkembangan sosial ekonomi wilayah di kab. Sragen tahun 1990-2000
Dodi Widiyanto, Drs. R. Rijanta, M.Sc.; Andri Kurniawan, S.Si., M.Si.
Universitas Gadjah Mada, 2003 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Perbedaan potensi fisik,ekonomi dan sosial yang dimiliki oleh setiap wilayah berpengaruh terhadap perkembangan wilayah yang bersangkutan. Hal ini berakibat pada tidak samanya perkembangan yang terjadi di suatu wilayah. Wilayah yang memiliki sumberdaya melimpah didukung kualitas sumberdaya manusia yang tinggi relatif akan memiliki tingkat perkembangan tinggi apabila dibandingkan dengan wilayah lain yang relatif kurang didukung oleh sumberdaya yang mendukung perkembangan suatu wilayah.

Perkembangan wilayah tidak hanya disebabkan oleh faktor-faktor yang sifatnya statis, akan tetapi dapat disebabkan oleh pengaruh aktivitas manusia sebagai pelaku pembangunan serta adanya hubungan ataupun keterkaitan antarwilayah. Dengan adanya aktivitas manusia dan hubungan antarwilayah akan menyebabkan suatu migrasi dari wilayah yang kurang berkembang menuju ke wilayah yang berkembang. Oleh Rijanta, 2002 dikatakan bahwa migrasi penduduk penting artinya bagi perkembangan wilayah karena melalui mekanisme ini perbedaan-perbedaan dalam komposisi kependudukan antarwilayah akan terbentuk. Oleh karena setiap migrasi hampir selalu selektif oleh umur dan jenis kelamin, gerak penduduk antar wilayah akan memberikan perubahan-perubahan jangka panjang dalam hal komposisi demografis, sosial maupun ekonomi, baik didaerah asal maupun di daerah tujuannya. Wilayah-wilayah yang menjadi tujuan migrasi akan memiliki penduduk dengan struktur yang sangat berbeda jika dibandingkan dengan wilayah-wilayah asal sebagai pengirim migran. Perbedaan yang sangat mudah diamati antara lain dalam hal komposisi demografis (seperti umur, jenis kelamin maupun struktur rumah tangganya), sosial-budaya (seperti pendidikan, agama, bahasa percakapan sehari-hari dan komposisi etnis) serta ekonomi (seperti kesempatan kerja dan pendapatan) Dengan cara pandang yang lain komposisi demografi, sosial dan ekonomi tertentu merupakan cerminan pentingnya migrasi dalam menciptakan perubahan-perubahan sosial-ekonomi di suatu wilayah tertentu.

Pembangunan yang dilaksanakan sampai sejauh ini telah memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat akan tetapi di samping manfaat yang

Pola spasial perkembangan sosial ekonomi wilayah di kab. Sragen tahun 1990-2000
Dodi Widiyanto, Drs. R. Rijanta, M.Sc.; Andri Kurniawan, S.Si., M.Si.
Universitas Gadjah Mada, 2003 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

dihasilkan terdapat pula masalah yang ditimbulkan oleh pembangunan itu sendiri baik dalam sektor ekonomi, sosial dan sektor-sektor pembangunan yang lain. Sumodingrat, 1996 menyebutkan bahwa tiga masalah utama pembangunan ekonomi yang saling bertalian adalah pengangguran, ketimpangan baik antargolongan penduduk, antarsektor maupun antardaerah serta kemiskinan.

Pembangunan di Indonesia yang sudah berlangsung selama beberapa dekade mengakibatkan adanya perubahan kondisi menuju ke arah yang lebih baik dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Peningkatan terhadap pembangunan terutama di daerah perlu dilaksanakan supaya hasil-hasil pembangunan tersebut merata di seluruh daerah. Ketidakmerataan distribusi hasil-hasil pembangunan mengakibatkan timbulnya kegagalan pembangunan dan berbagai masalah dalam berbagai sendi kehidupan. Permasalahan yang diakibatkan dari gagalnya suatu pembangunan adalah timbulnya kesenjangan antar wilayah dan kemiskinan, karena fenomena kesenjangan akan diikuti kemiskinan di suatu daerah. Selanjutnya kesenjangan pertumbuhan menyebabkan perbedaan tingkat perkembangan wilayah. Perkembangan yang terjadi di suatu wilayah dapat terjadi atas dasar aspek fisik, sosial serta ekonomi yang ada di wilayah tersebut. Perkembangan sosial ekonomi terkait erat dengan kemiskinan serta kesenjangan dan usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama di daerah perdesaan.

Mengingat pentingnya studi mengenai perbedaan perkembangan wilayah, distribusi dan asosiasi elemen-elemen di dalam ruang maka penulis bermaksud melakukan penelitian di Kabupaten Sragen. Judul penelitian yang dipilih adalah : **Pola Spasial Perkembangan Sosial Ekonomi Wilayah di Kabupaten Sragen.**

I.2. Perumusan Masalah.

Potensi fisik, sosial dan ekonomi yang terdapat di suatu wilayah merupakan modal dasar suatu wilayah dalam melaksanakan pembangunan di wilayahnya. Ketidaksamaan potensi dasar yang dimiliki oleh setiap wilayah disinyalir sebagai penyebab perbedaan tingkat perkembangan antar unit wilayah.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Pola spasial perkembangan sosial ekonomi wilayah di kab. Sragen tahun 1990-2000
Dodi Widiyanto, Drs. R. Rijanta, M.Sc.; Andri Kurniawan, S.Si., M.Si.
Universitas Gadjah Mada, 2003 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Dalam hal ini kesenjangan pertumbuhan antarwilayah merupakan fenomena yang umum terjadi. Kesenjangan yang umum terjadi di suatu wilayah adalah kesenjangan sosial ekonomi, dikarenakan sifat sosial ekonomi itu sendiri yang relatif dinamis apabila diperbandingkan dengan sifat fisis suatu wilayah.

Persebaran penduduk di Kabupaten Sragen saat sekarang masih terkonsentrasikan pada jalur utama jalan arteri primer (Surakarta-Sragen-Surabaya) dan kolektor primer (Surakarta-Gemolong-Purwodadi). Pada umumnya konsentrasi persebaran penduduk dan perkembangan yang pesat masih terpusat pada kota-kota kecamatan yang dilalui jalur-jalur tersebut seperti Masaran, Sidoharjo, Ngrampal, Sambungmacan, Gemolong, Sumberlawang dan khususnya ibukota kabupaten sendiri yaitu Kota Sragen.Terjadinya konsentrasi penduduk di kota dan sekitarnya daerah tersebut karena didukung jalur transportasi yang strategis dan adanya kegiatan perekonomian. Situasi ini dimbangi tersedianya sarana dan prasarana sosial ekonomi yang memadai.(RTRW Kabupaten Sragen, 1996)

Kecamatan Miri, Sumberlawang, Mondokan, Sukodono, Gesi, Tangen dan Jenar mempunyai kepadatan penduduk paling rendah, hal ini disebabkan kondisi lahan/tanah yang relatif kurang subur, struktur tanah yang labil. Dengan demikian daerah tersebut kurang diminati penduduk, sehingga banyak yang pindah keluar dan kecilnya pertambahan penduduk. Kondisi struktur tanah yang labil mengakibatkan badan jalan dan kondisi fisik jalan sering mengalami kerusakan sehingga kegiatan transportasi/perekonomian sangat tergangu. Kondisi alamiah tersebut menyebabkan aktivitas pertanian di wilayah Kabupaten Sragen tersebar pada daerah-daerah sekitar lintasan Bengawan Sala, di dataran rendah. Di wilayah utara yang berbatasan dengan Kabupaten Grobogan, kondisi lahan yang kurang subur, relatif lebih rendah produksi pertanian khususnya tanaman pangan.(RTRW Kabupaten Sragen, 1996)

Berdasarkan rumusan masalah diperlukan suatu penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai perkembangan wilayah yang terjadi di

Pola spasial perkembangan sosial ekonomi wilayah di kab. Sragen tahun 1990-2000
Dodi Widiyanto, Drs. R. Rijanta, M.Sc.; Andri Kurniawan, S.Si., M.Si.
Universitas Gadjah Mada, 2003 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Kabupaten Sragen. Isu kesenjangan dan kemajuan antar wilayah di Kabupaten Sragen seperti yang tertuang di dalam Pola Dasar Pembangunan serta Program Pembangunan Daerah Kabupaten Sragen menjadi pokok perhatian dalam penelitian. Perbedaan kemampuan perkembangan atas dasar potensi yang dimiliki mengakibatkan tidak semua wilayah berkembang secara bersama-sama mengakibatkan adanya pola spasial perkembangan wilayah selain itu dari kemampuan perkembangan suatu wilayah dapat dipergunakan untuk mengidentifikasi perbedaan kemajuan suatu wilayah serta faktor-faktor yang mempengaruhi.

Dari uraian diatas permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimanakah dinamika perkembangan (sosial ekonomi) wilayah yang terjadi di Kabupaten Sragen.
2. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi perbedaan tingkat perkembangan (sosial ekonomi) wilayah di Kabupaten Sragen.
3. Bagaimanakah pola spasial, distribusi (persebaran) dan arah (kecenderungan) perkembangan (sosial ekonomi) wilayah di Kabupaten Sragen.
4. Arahan kebijakan apa yang dapat dilakukan dalam pengembangan wilayah di Kabupaten Sragen

I.3. Maksud danTujuan Penelitian.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui perkembangan sosial ekonomi desa-desa beserta dinamikanya di Kabupaten Sragen .
2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial ekonomi wilayah Kabupaten Sragen.
3. Mengetahui pola spasial perkembangan sosial ekonomi wilayah di Kabupaten Sragen .

Pola spasial perkembangan sosial ekonomi wilayah di kab. Sragen tahun 1990-2000
Dodi Widiyanto, Drs. R. Rijanta, M.Sc.; Andri Kurniawan, S.Si., M.Si.
Universitas Gadjah Mada, 2003 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

4. Menentukan arahan (rekomendasi) pengembangan wilayah Kabupaten Sragen.

I.4.Kegunaan Penelitian.

Hasil penelitian ini dapat memberikan kegunaan sebagai berikut :

1. Merupakan salah satu syarat akademik dalam menyelesaikan program sarjana S-1 di Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada.
2. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah daerah Kabupaten Sragen dalam menyusun kebijakan pengembangan wilayah.
3. Sumber informasi bagi penelitian sejenis pada masa mendatang.

I.5.Tinjauan Pustaka dan Penelitian Sebelumnya.

1.5.1. Studi Geografi.

Dalam geografi terpadu, untuk mendekati atau menghampiri masalah dalam geografi digunakan tiga pendekatan yaitu pendekatan keruangan, analisis ekologi, dan analisis kompleks wilayah. Pendekatan yang digunakan geografi terpadu tidak membedakan antara elemen fisikal dan non fisikal (Bintarto,1987).

Geografi menurut Bintarto (1988), adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang kewilayahan atau kelingkungan dalam konteks keruangan. Obyek kajian geografi yaitu obyek material dan obyek formal. Obyek material adalah erat kaitannya dengan beberapa aspek kehidupan manusia, lingkungan dan aspek pembangunan, sedangkan obyek formal adalah cara memandang dan cara berfikir terhadap obyek material tersebut dari segi keruangan yang meliputi pola , sistem , dan proses.

Heslinga (1975) dalam Bintarto (1988) mengatakan bahwa terdapat tiga hal yang pokok dalam mempelajari obyek formal dari sudut pandang keruangan, yaitu (1). Pola dari sebaran gejala tertentu di muka bumi (*spatial pattern*), (2). Keterkaitan atau hubungan sesama antar gejala tersebut (*spatial system*), (3). Perkembangan atau perubahan yang terjadi pada gejala tersebut (*spatial process*).

Pola spasial perkembangan sosial ekonomi wilayah di kab. Sragen tahun 1990-2000
Dodi Widiyanto, Drs. R. Rijanta, M.Sc.; Andri Kurniawan, S.Si., M.Si.
Universitas Gadjah Mada, 2003 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Effendi, mengatakan bahwa sekurang-kurangnya ada dua pendekatan yang dapat dikembangkan dalam Geografi saat ini, yakni pendekatan wilayah dan pendekatan keruangan (dalam arti luas lingkungan). Penerapan pendekatan wilayah dan keruangan geografi antara lain dapat membantu dalam menyediakan informasi tentang potensi wilayah dengan melakukan deliniasi wilayah untuk pengembangan. Menurut United Nation (1980: 89) dalam Effendi deliniasi wilayah dapat dilakukan dengan dua cara :

1. Deduktif atau divisif, cara ini dilakukan dengan membagi wilayah nasional menjadi wilayah-wilayah pembangunan yang didasarkan pada ciri-ciri tertentu dan adanya keterkaitan antarwilayah.
2. Induktif atau aglomeratif, cara ini dilakukan dengan mengelompokkan wilayah-wilayah kecil yang mempunyai karakteristik yang sama atau saling keterkaitan menjadi satu wilayah pembangunan.

1.5.1. Analisa Keruangan.

Sumaatmadja (1988) mengatakan bahwa pembahasan dalam analisa keruangan tertuju pada teori dan model keruangan yang akan dipergunakan. Hal-hal yang menjadi fokus perhatian analisa keruangan adalah mengenai lokasi, distribusi (persebaran) , difusi, dan interaksi keruangan.

Lokasi akan memberikan penjelasan lebih jauh tentang tempat atau daerah yang bersangkutan. Pada studi geografi, lokasi ini merupakan variabel yang dapat mengungkapkan berbagai hal tentang gejala yang dipelajari. Lokasi dalam ruang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu lokasi absolut dan relatif. Lokasi absolut suatu wilayah, yaitu lokasi yang berkenaan dengan posisinya menurut garis lintang dan garis bujur. Dengan dinyatakan lokasi absolut suatu wilayah, karakteristik wilayah yang bersangkutan sudah dapat diabstraksikan lebih jauh. Sekurang-kurangnya posisi dan iklim sudah dapat kita perhitungkan. Untuk memperhatikan karakteristik lebih jauh, harus diketahui lokasi relatifnya. Lokasi relatif suatu wilayah, yaitu lokasi wilayah yang bersangkutan berkenaan dengan hubungan wilayah itu dengan faktor alam atau faktor budaya yang ada di sekitarnya. Lokasi relatif suatu tempat, memberikan gambaran tentang keterbelakangan,

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Pola spasial perkembangan sosial ekonomi wilayah di kab. Sragen tahun 1990-2000
Dodi Widiyanto, Drs. R. Rijanta, M.Sc.; Andri Kurniawan, S.Si., M.Si.
Universitas Gadjah Mada, 2003 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

perkembangan, dan kemajuan wilayah yang bersangkutan bila dibandingkan dengan wilayah lain yang ada di sekitarnya, dan dapat mengungkapkan pula mengapa kondisinya demikian.

Untuk mengevaluasi persebaran atau distribusi keruangan gejala geografi dipergunakan dua konsep. Konsep yang pertama adalah analisa tetangga terdekat (*nearest neighbour analysis*) dan yang kedua adalah analisa varian distribusi keruangan (*variance analysis of spatial distribution*). Untuk menganalisa berbagai pola penyebaran gejala geografi dapat diterapkan analisa tetangga terdekat. Metode kuantitatif ini membatasi suatu skala yang berkenaan dengan pola-pola penyebaran pada ruang atau wilayah tertentu. Pada dasarnya, pola penyebaran itu dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu pola bergerombol (*cluster pattern*), tersebar tidak merata (*random pattern*), dan tersebar merata (*dispersed pattern*).

Tiga bentuk dasar pola perkembangan ruang adalah a) pola konsentris, memiliki daya tarik berkembang ke segala arah dengan kekuatan dan jarak yang sama. Ini adalah bentuk yang sangat ideal dari perkembangan kota, b) poa pita (*ribbon-shaped*), memiliki daya tarik berkembang dari keberadaan jalur transportasi, namun mengalami kendala untuk berkembang ke samping karena sebab-sebab seperti tertutup daerah pegunungan, sungai, laut, dan kendala topografis lain, dan c) pola tangan gurita (*octopus/star-shaped*), memiliki ciri daya tarik yang sama dengan pola pita, hanya saja tidak ada hambatan fisik yang berarti untuk mengalami perkembangan (Northam, 1975 dalam Iskandar, 1999). Oleh Nelson, 1958 dalam Iskandar 1999 dikemukakan bahwa adanya perbedaan pola perkembangan ini disebabkan oleh dua faktor penting, yaitu a) daya tarik dari kenampakan fisik suatu wilayah seperti jalan raya sebagai jalur transportasi dan komunikasi, dan b) kendala fisik alami dan buatan (*natural and artificial constraint*)

1.5.2. Perkembangan (sosial ekonomi) wilayah.

Salah satu aspek mendasar yang sangat penting dalam memahami kondisi sosial ekonomi suatu masyarakat adalah bahwa kondisi sosial ekonomi sangat

Pola spasial perkembangan sosial ekonomi wilayah di kab. Sragen tahun 1990-2000
Dodi Widiyanto, Drs. R. Rijanta, M.Sc.; Andri Kurniawan, S.Si., M.Si.
Universitas Gadjah Mada, 2003 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

sensitif terhadap ruang dan waktu. Artinya sangatlah besar kemungkinan kondisi sosial ekonomi suatu wilayah berlainan dengan wilayah lain. Disamping itu, perubahan kondisi sosial ekonomi di suatu wilayah merupakan proses yang sangat cepat dan dinamis. (Tim Pembimbing KKL II, 2002).

Dalam konteks yang khusus, yaitu terkait dengan disiplin geografi, pengertian sosial ekonomi tidak dapat dipisahkan dari interaksinya dengan lingkungan alam. Hubungan antara kondisi sosial ekonomi dan lingkungan alam bersifat "reciprocal" (timbal balik). Intensitas hubungan tersebut pada akhirnya akan menjadi unsur utama dalam proses pembangunan. Dengan dasar tersebut sejak beberapa waktu yang lalu kesadaran mengenai interaksi antara lingkungan sosial dan lingkungan alam mulai menjadi bagian yang sangat penting dalam diskusi mengenai proses pembangunan nasional (Tim Pembimbing KKL II,2002).

Dari segi mikro, variabel sosial ekonomi merupakan refleksi perubahan atau perkembangan individu sebagai hasil dari proses adaptasi terhadap lingkungannya, baik lingkungan alam maupun sosial ekonomi. Secara makro, dinamika sosial ekonomi yang tergambar dari variabel-variabelnya, merupakan indikator perkembangan suatu wilayah. Keberhasilan atau kegagalan suatu pembangunan dapat dicerminkan oleh perubahan variabel sosial ekonomi di wilayah tersebut (Tim Pembimbing KKL II,2002).

Perkembangan kota dan wilayah di Indonesia dapat dilihat sebagai hasil resultante kegiatan sosial ekonomi dengan lingkungan yang dipengaruhi oleh interaksi kebijakan pemerintah dan rekasi dari masyarakat (Sumadibyo, 1994). Mengingat kondisi geografis wilayah yang tidak sama mengakibatkan perkembangan wilayah yang berbeda-beda. Tingkat kemajuan pembangunan antardaerah beragam sehingga menghasilkan tingkat kemakmuran yang berbeda pula. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan didaerah pada hakekatnya ditentukan oleh potensi sumberdaya alam yang ada, prasarana dan sarana yang dibangun, modal yang tersedia, serta kemampuan sumberdaya manusia di masing-masing daerah. Keempat sumberdaya tersebut harus cukup tersedia untuk

Pola spasial perkembangan sosial ekonomi wilayah di kab. Sragen tahun 1990-2000
Dodi Widiyanto, Drs. R. Rijanta, M.Sc.; Andri Kurniawan, S.Si., M.Si.
Universitas Gadjah Mada, 2003 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

menunjang pembangunan daerah (Sumodiningrat,1996). Analisis wilayah (regional) ialah cara melihat berbagai faktor perkembangan dalam skala wilayah (Warpani, 1984). Oleh Dilahur, 1983 dikatakan bahwa faktor perkembangan wilayah dapat meliputi semua faktor wilayah baik faktor fisik, faktor sosial, faktor ekonomi, faktor politik, dan faktor budaya atau hanya beberapa dari faktor wilayah tersebut.

Perkembangan suatu wilayah tidak dapat terlepas dari pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi wilayah tersebut. Christanto, 2002 mengatakan bahwa faktor-faktor internal dan eksternal yang diperkirakan dapat mempengaruhi jalannya pembangunan regional masa kini dan masa yang akan datang, faktor yang dimaksud antara lain disebabkan oleh adanya faktor-faktor internal ,yaitu Faktor Sumberdaya Wilayah, Faktor Sumberdaya Manusia, Faktor Kedudukan Geografis, Faktor Perkembangan Penduduk dan Demografi, Faktor Peningkatan Kebutuhan. Faktor Perkembangan Persepsi Masyarakat, Faktor Pembangunan Sektoral dan Daerah, Faktor Kesenjangan. Sedangkan Faktor Eksternal tersebut adalah Faktor Era Globalisasi, Faktor Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Faktor Persepsi Masyarakat Internasional.

Pengembangan wilayah (*regional development*) sebagai upaya untuk memacu perkembangan sosio-ekonomi, mengurangi kesenjangan, dan menjaga kelestarian lingkungan hidup pada suatu wilayah, sangat diperlukan karena kondisi sosial-ekonomi, budaya dan geografis yang sangat berbeda antara suatu wilayah dengan wilayah lainnya.(Firman, 1999). Dilahur (1983) mengatakan bahwa untuk mencapai tujuan pengembangan wilayah, maka perencanaannya harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan wilayahnya. Tingkat perkembangan wilayah dicerminkan oleh tingkat kesejahteraan, tingkat kemajuan dan tingkat perkembangan budaya masyarakat. Untuk mengetahui keragaman perkembangan wilayah yaitu dengan membandingkan tingkat perkembangan wilayah yang satu dengan membandingkan tingkat perkembangan wilayah yang satu dengan wilayah lainnya.

Pola spasial perkembangan sosial ekonomi wilayah di kab. Sragen tahun 1990-2000
Dodi Widiyanto, Drs. R. Rijanta, M.Sc.; Andri Kurniawan, S.Si., M.Si.
Universitas Gadjah Mada, 2003 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Penelitian Dilahur mengenai tingkat perkembangan wilayah dapat diketahui dengan melihat tiga indikator yang dipergunakan. Tingkat kesejahteraan penduduk suatu wilayah dapat diketahui dengan melihat tinggi rendahnya tingkat kematian, tingkat kemajuan penduduk ditunjukkan oleh pendidikan yang telah dicapai oleh penduduknya dan tingkat perkembangan budaya masyarakat ditunjukkan oleh keragaman mata pencaharian penduduk.

Menurut Amien, 1992 dalam Astuti, 2000 untuk membandingkan tingkat perkembangan wilayah yang terdapat pada suatu wilayah dapat menggunakan beberapa indikator sosial ekonomi yang mencerminkan hasil-hasil pembangunan untuk mencukupi kebutuhan dasar penduduk. Dengan mengetahui perkembangan relatf setiap unit wilayah dapat diidentifikasi kesenjangan pembangunan antar unit wilayah. Semakin bervariasi indikator yang dipilih diyakini akan semakin akurat indeks yang dihasilkan.

Penelitian yang dilakukan oleh Kusumadewa, 1975 di daerah Bandung, Jawa Barat mengkaji evaluasi perkembangan sosial ekonomi pada tingkat desa di Bandung. Penelitian yang dilakukan Kusumadewa mempergunakan indikator kependudukan, kondisi fisik wilayah, mempertimbangkan teknologi, ekonomi serta kelembagaan pemerintah. Selain itu penelitian yang dilakukan Kusumadewa mempergunakan 91 variabel yang pada akhirnya dapat dijumpai pola-pola dari setiap aktivitas sosial ekonomi penduduk.

Rondinelli (1985) mengatakan bahwa indeks tingkat perkembangan wilayah (*level of development index*) dapat dilihat dalam tiga indikator sebagai berikut :

1. Karakteristik sosial ekonomi dan demografi yang diperoleh dari pendapatan per kapita, kebutuhan fisik minimum, produk domestik bruto, investasi, jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk, kepadatan penduduk, usia harapan hidup, tingkat kematian bayi per 1000 penduduk, jumlah fasilitas kesehatan.

Pola spasial perkembangan sosial ekonomi wilayah di kab. Sragen tahun 1990-2000
Dodi Widiyanto, Drs. R. Rijanta, M.Sc.; Andri Kurniawan, S.Si., M.Si.
Universitas Gadjah Mada, 2003 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

2. Kontribusi industri dan produksi pertanian yang diperoleh dari persentase penyerapan tenaga kerja, jumlah perusahaan komersial, luas total lahan pertanian, produktivitas pertania, luas lahan sawah, luas lahan pertanian untuk hidup layak.
3. Transportasi yang diukur melalui kualitas jalan, kepadatan jalan, tipe jalan, dan panjang jalan.

Muta'ali , 2000 mengatakan bahwa tingkat perkembangan sosial ekonomi wilayah dapat diketahui dengan mempertimbangkan variabel-variabel sebagai berikut : perumahan (sumber air bersih, ketersediaan WC, listrik, dan kondisi rumah), pendidikan (% penduduk melek huruf, % jumlah anak usia sekolah yang bersekolah, % murid SLTP dibanding jumlah penduduk, % lulus sekolah terhadap jumlah penduduk), kesehatan (jumlah fasilitas kesehatan setiap luasan wilayah, jumlah tenaga kesehatan per 1000 penduduk, jumlah kematian, jumlah kematian bayi), kesempatan kerja (persentase penduduk usia kerja, rasio ketergantungan, komposisi pekerja menurut sektor), kelembagaan, dan aksesibilitas (kondisi jalan, dan akses komunikasi). Lebih lanjut Muta'ali mengatakan bahwa prinsip utama dalam penentuan Indikator Perkembangan Wilayah tergantung sumber data yang tersedia atau yang digunakan, semakin banyak dan variatif indikator dan variabel yang digunakan semakin baik dan akurat, dan tidak terjadi perhitungan ganda (*double counting*) terhadap variabel yang digunakan.

Transportasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan wilayah. Hubungan yang terbentuk antara transportasi dan pembangunan dijelaskan oleh Charles Kindleberger sebagai berikut : *....market grow because of improvement in transportation and ommunication. The market is originally local and small. Demand is restricted by the cost of getting goods out of village and ignorance of how much they can be bought for outside. In these circumstances, market grow throught increases in transport and communication. The expansion becomes cumulative. Increased outlets in turn raise the demand for other products. As new supplies of these come on the market, in turn, incomes grow further. The linkage of markets by an improvement in transportation, or by*

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Pola spasial perkembangan sosial ekonomi wilayah di kab. Sragen tahun 1990-2000
Dodi Widiyanto, Drs. R. Rijanta, M.Sc.; Andri Kurniawan, S.Si., M.Si.
Universitas Gadjah Mada, 2003 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

the improvement in a product that makes it lighter and more readily transported becomes part of the development process. (Kindleberger,1965 in Hurst,1974)

1.5.3. Variasi keruangan dalam pembangunan

Didalam suatu wilayah yang luas, terdapat beberapa perbedaan kemampuan atau potensi, dan masalah-masalah yang dihadapi. Perbedaan-perbedaan ini erat hubungannya dengan tingkat perkembangan daerah yang bersangkutan. Untuk menghindari kecenderungan perbedaan tingkat perkembangan , perlu diusahakan agar kegiatan-kegiatan pembangunan disesuaikan dengan kemampuan atau potensi dari masing-masing daerah tersebut (Muta'ali, 1999).

Menurut Myrdal (1957,dalam Muta'ali,1999), pertumbuhan ekonomi dalam suatu wilayah tertentu bergantung pada lokasi dari sumberdaya alam dan keuntungan-keuntungan lokasi lainnya. Pertumbuhan ini akan terjadi pada daerah belakangnya melalui *spread effect* dan menyerap melalui *backwash effect*. Lebih lanjut Myrdal menyatakan bahwa, perbedaan laju pertumbuhan antar wilayah tersebut tidak hanya disebabkan oleh lokasi sumberdaya alam tetapi dipengaruhi pula oleh efek kumulatif dari pertumbuhan ekonomi yang terjadi.

Hirschman (1958, dalam Muta'ali, 1999) menyatakan bahwa, pertumbuhan ekonomi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari faktor-faktor lingkungan dan adanya keuntungan-keuntungan lokasi. Dalam Hinderink dan Murtomo,1988, seperti yang dikemukakan oleh Hirschman bahwa penanaman modal yang banyak di *core regions* akan mempercepat pertumbuhan *core* dan efek polarisasi pembangunan akan digantikan oleh oleh *trickling down-effect* pembangunan. Menurut Hirschman perbedaan keruangan pembangunan merupakan hal yang sementara sifatnya serta bahwa intervensi pemerintah akan mempercepat menghilangkan ketimpangan keruangan ini.

Pola spasial perkembangan sosial ekonomi wilayah di kab. Sragen tahun 1990-2000
Dodi Widiyanto, Drs. R. Rijanta, M.Sc.; Andri Kurniawan, S.Si., M.Si.
Universitas Gadjah Mada, 2003 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Friedmann (1972, dalam Muta'ali,1999),menyatakan bahwa pembangunan merupakan suatu proses integrasi sosial dan ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh adanya inovasi-inovasi pada daerah inti atau *core area* yang kemudian menyebar pada daerah belakangnya yang disebut sebagai *periphery*. Pertumbuhan tersebut terjadi secara kumulatif dalam lingkup sosial dari kota-kota atau wilayah-wilayah, dimana terdapat berbagai kemudahan dalam sistem komunikasi dan informasi, kemampuan memecahkan masalah sosial dan sebagainya. Munculnya pertumbuhan pada *core area* mempunyai pengaruh spasial yang cenderung terpolarisasi. Menurut Friedmann tingkat urbanisasi sebagai indikator tingkatan kemajuan suatu wilayah, semakin maju tingkatan ekonomi suatu kota semakin tinggi tingkatan urbanisasi sehingga semakin berintegrasi keruangan ekonomi keruangannya, dan akhirnya semakin berkurang perbedaannya dalam perbedaan (keruangan) pembangunan.

Geografi pembangunan mempunyai peranan yang sangat besar di dalam difusi keruangan pembangunan. Konsep modernisasi tidak disamakan dengan industri karena industri hanya merupakan salah satu bagian saja dari pembangunan, yaitu aspek ekonomi (Hinderink dan Murtomo, 1988). Lebih lanjut dikatakan oleh Hinderink dan Murtomo bahwa modernisasi dapat dilihat sebagai proses sosial dan keruangan.

Menurut Leinbach, 1972, modernisasi adalah transformasi keruangan suatu daerah sebagai akibat peningkatan ilmu pengetahuan manusia yang diaplkasikan. Modernisasi menyebar melalui jaringan pusat-pusat pelayanan yang berkembang :

"To the geographer, modernization is the spatial transformation of an area as the progressive increase in man's knowledge is communicated and applied. The politically bounded area may be viewed as a development surface, and modernization as the spatial process by which clusters of change originate within the dominant nodes of the urban pattern and gradually diffuse through the network of developing central places. Thus, the 'natural' flow of modernization is closely linked, initially, with the process of urbanization. From the urban nodes or 'growth poles' where activity is concentrated, innovations are drawn outward impelled by economic, social, and political oppurtinities. The rate at which modernization diffuses is closely related to the intensity of the intensity of the

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Pola spasial perkembangan sosial ekonomi wilayah di kab. Sragen tahun 1990-2000
Dodi Widiyanto, Drs. R. Rijanta, M.Sc.; Andri Kurniawan, S.Si., M.Si.
Universitas Gadjah Mada, 2003 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

potential or attracting forces in peripheral areas as well as the build up of administrative and economic 'push' forces at the development points"

1.5.4. Pengidentifikasian kesenjangan dan tingkat kemajuan suatu wilayah.

Kesenjangan antarwilayah yang terjadi dapat diidentifikasi dengan menggunakan berbagai metode yang telah dipaparkan oleh berbagai ahli pembangunan wilayah, seperti penggunaan Indeks Williamson untuk pengukuran kesenjangan antarwilayah. Berikut adalah penggunaan metode lain yang dapat dipergunakan untuk pengidentifikasian tingkat kemajuan wilayah.

Rijanta, 2002 mengungkapkan bahwa penggunaan tipologi desa dari hasil klasifikasi desa dapat dipergunakan untuk penentuan prioritas pembangunan baik dari segi sektor maupun lokasinya. Selain itu kesenjangan antardaerah dan antarlapisan masyarakat juga akan dapat dideteksi dari tipologi desa yang dibuat.

Menurut Anwar dan Hadi (1996), pertumbuhan suatu unit wilayah sering tidak seimbang dengan unit wilayah lainnya.Dengan kata lain masih terjadi kepincangan daam pembangunan yang disebabkan oleh, *pertama*, perbedaan karakteristik limpahan sumberdaya alam, *kedua* perbedaan demografi, *ketiga* perbedaan kemampuan sumberdaya manusia, *keempat* perbedaan potensi lokasi, *kelima* perbedaan aspek aksesibilitas dan kekuasaan dalam pengambilan keputusan, *keenam* perbedaan aspek potensi pasar. Perbedaan pertumbuhan dapat terjadi disebabkan oleh beberapa faktor sekaligus yang saling berkaitan.

Selanjutnya Anwar dan Hadi membuat tipologi karakteristik wilayah ditinjau dari aspek kemajuan wilayah yang bersumber dari Friedmann yaitu :

1. Wilayah maju adalah wilayah telah berkembang yang biasa dicirikan sebagai pusat pertumbuhan. Di wilayah ini terdapat pemusatan penduduk, industri, pemerintahan, dan sekaligus pasar yang potensial. Selain itui dicirikan oleh tingkat pendapatan yang tinggi,tingkat pendidikan dan kualitas sumberdaya manusia yang juga tinggi. Biasanya wilayah maju berkembang karena didukung oleh potensi sumberdaya alam baik yang ada di wilayah tersebut maupun dari wilayah belakangnya, potensi lokasi yang strategis, tingginya kualitas sumberdaya manusia karena didukung oleh

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Pola spasial perkembangan sosial ekonomi wilayah di kab. Sragen tahun 1990-2000
Dodi Widiyanto, Drs. R. Rijanta, M.Sc.; Andri Kurniawan, S.Si., M.Si.
Universitas Gadjah Mada, 2003 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

sarana pendidikan yang lengkap, dan aksesibilitas yang sangat baik terhadap pasar domestik dan pasar internasional karena didukung oleh sarana pendidikan yang lengkap, seperti jalan, pelabuhan, alat komunikasi, dan sarana penunjang lainnya. Namun bila wilayah maju tidak memperhatikan keseimbangan wilayah dan cenderung mengeksploitasi wilayah pendukungnya sehingga menjadi sangat maju dan tidak seimbang akan muncul permasalahan *diseconomic of scale*, yaitu munculnya penurunan produktivitas akibat kenaikan baik biaya produksi langsung seperti tuntutan kenaikan upah, kenaikan harga faktor produksi atau masalah manajemen lainnya, maupun munculnya biaya-biaya sosial yang harus ditanggung seperti peningkatan pelayanan umum misalnya kesehatan, transmigrasi, pendidikan, maupun keamanan dan munculnya permasalahan sosial lain seperti kemacetan dan kecelakaan lalu lintas, tingkat kriminalitas yang tinggi, peningkatan harga lahan, masalah perumahan,banjir, dan lain-lain. Wilayah maju juga dicirikan oleh struktur ekonomi yang secara relatif didominasi sektor industri dan jasa.

2. Wilayah sedang berkembang biasanya dicirikan oleh pertumbuhan yang cepat dan merupakan wilayah penyangga wilayah maju. Wilayah ini mempunyai aksesibilitas sangat baik terhadap wilayah maju. Ciri lainnya adalah potensi sumberdaya alam yang tinggi, tingkat pendapatan dan kesempatan kerja yang tinggi, namun belum terjadi kesesakan dan tekanan biaya sosial. Secara relatif, struktur ekonomi wilayah sedang berkembang masih terjadi keseimbangan antara peranan sektor pertanian atau primer lainnya dengan sektor industri. Sektor jasa sudah mulai berkembang walau perannya masih kecil.

3. Wilayah yang belum berkembang dicirikan oleh tingkat pertumbuhan yang masih rendah, baik absolut maupun relatif, namun memiliki potensi sumberdaya yang belum dikelola atau dimanfaatkan. Tingkat kepadatan penduduk dalam wilayah ini masih rendah, begitu pula tingkat pendapatan dan pendidikan mereka yang berada di wilayah ini relatif masih rendah. Selain belum mempunyai aksesibilitas yang baik terhadap wilayah lainnya,

Pola spasial perkembangan sosial ekonomi wilayah di kab. Sragen tahun 1990-2000
Dodi Widiyanto, Drs. R. Rijanta, M.Sc.; Andri Kurniawan, S.Si., M.Si.
Universitas Gadjah Mada, 2003 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

struktur ekonomi wilayah ini masih didominasi sektor primer dan biasanya belum mampu membiayai pembangunan secara mandiri.

4. Wilayah yang tidak berkembang dicirikan oleh tiadanya potensi sumberdaya alam dan lokasi, atau keduanya, tetapi tidak dapat berkembang dan tumbuh karena tidak memiliki kesempatan dan cenderung dieksploitasi oleh wilayah yang lebih maju. Wilayah ini dapat pula dicirikan oleh tingkat kepadatan penduduk yang jarang, kualitas sumberdaya manusia yang rendah, tingkat pendapatan rendah, tidak memiliki infrastruktur yang lengkap dan tingkat aksesibilitas yang rendah.

Penelitian Suhudi tahun 1991 dalam Nurzaman, 1997 mengenai kesenjangan wilayah menggunakan indikator bidang ekonomi dan sosial. Indikator bidang ekonomi terdiri dari : jumlah pendapatan per kapita, pertumbuhan pendapatan per kapita, tingkat partisipasi angkatan kerja, persentase nilai tambah sektor manufaktur terhadap PDB total provinsi, persentase tenaga kerja yang bekerja pada sektor manufktur dibandingkan dengan tenaga kerja total provinsi, tingkat penanaman modal asing dan dalam negeri secara kumulatif, persentase penduduk yang tinggal di perkotaan, dan panjangjalan per 10.000 km2 luas provinsi. Indikator bidang sosial ditunjukkan oleh PQLI, jumlah murid sekolah dasar / jumlah penduduktotal, persentase tenaga kerja yang berpendidikan akademi atau universitas, rasio guru sekolah dasar / 10.000 murid sekolah dasar, rasio dokter / 10.000 penduduk, dan rasio tempat tidur sakit / 10.000 penduduk. Dari hasil penelitiannya, Suhudi mengatakan bahwa kesenjangan bidang ekonomi lebih besar daripada bidang sosial.

1.6. Kerangka Pemikiran Penelitian.

Kegiatan pembangunan di dalam suatu wilayah dan kebijakan pembangunan yang diterapkan di wilayah tersebut menyebabkan adanya variasi yang terjadi di wilayah tersebut. Dalam konteks penelitian ini, pembangunan dan kebijakan pembangunan yang diterapkan menghasilkan variasi kondisi sosial ekonomi, transportasi, dan sumberdaya manusia, ketiganya tidak dapat dipisahkan

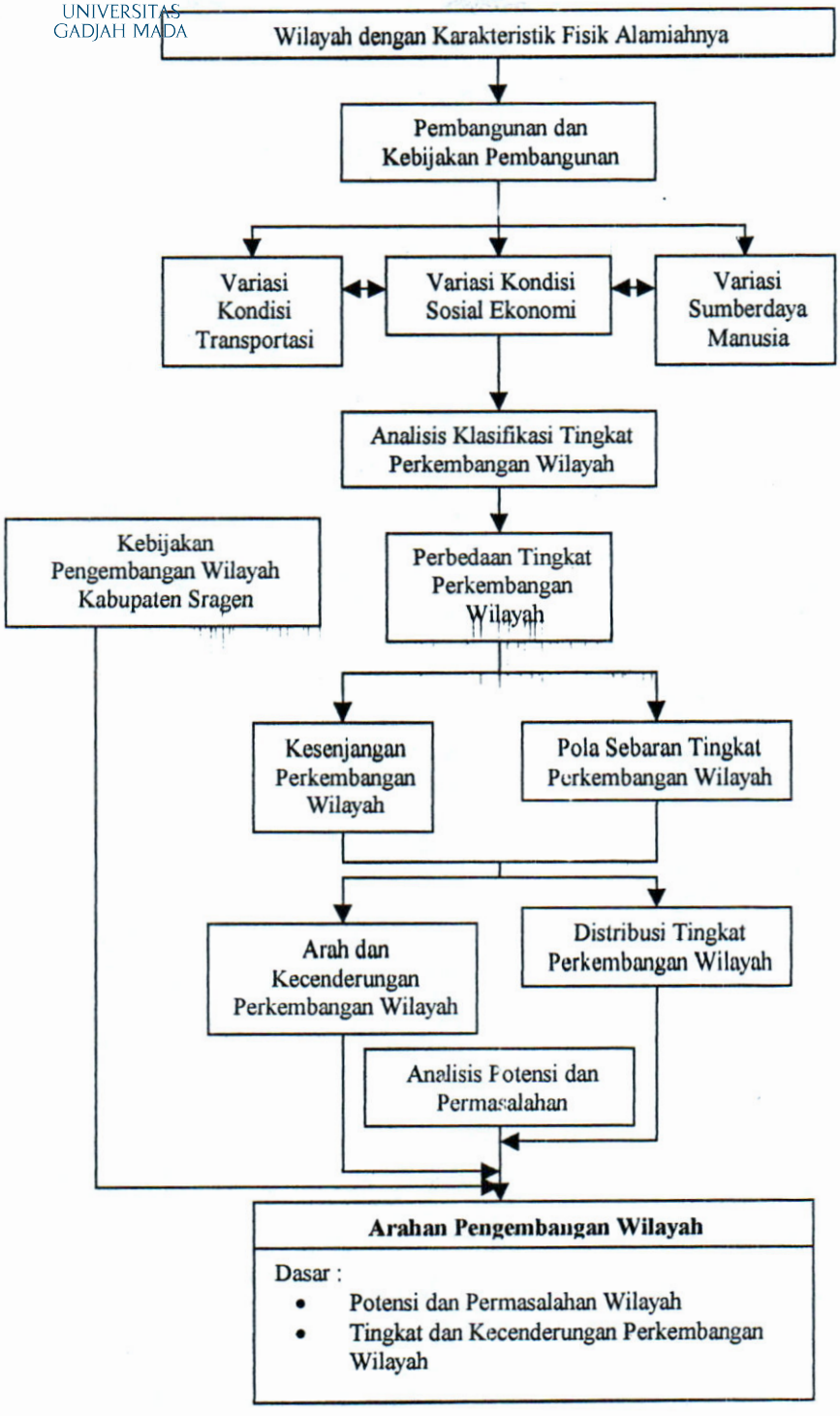
Pola spasial perkembangan sosial ekonomi wilayah di kab. Sragen tahun 1990-2000
Dodi Widiyanto, Drs. R. Rijanta, M.Sc.; Andri Kurniawan, S.Si., M.Si.
Universitas Gadjah Mada, 2003 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

sejalan dengan perkembangan proses pembangunan dan ketiga aspek tersebut merupakan hasil-hasil pembangunan.

Berdasarkan variasi kondisi sosial ekonomi di suatu wilayah, diperoleh klasifikasi tingkat perkembangan wilayah. Klasifikasi tingkat perkembangan wilayah yang diperoleh dapat digunakan untuk mengetahui perbedaan tingkat perkembangan wilayah, pola sebaran dari tingkat perkembangan wilayah, dan kesenjangan perkembangan wilayah. Perbedaan tingkat perkembangan wilayah diketahui dari distribusi jumlah klasifikasi tingkat perkembangan di suatu wilayah. Kesenjangan perkembangan yang terjadi diperoleh dari perbedaan tingkat perkembangan wilayah yang menunjukkan kemajuan secara relatif antarwilayah. Perbedaan tingkat perkembangan wilayah yang terjadi umumnya membentuk suatu pola tertentu yang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti karakteristik fisik wilayah, kondisi sosial ekonomi, aspek transportasi dan sumberdaya manusia. Kesenjangan yang terjadi di suatu wilayah selain membentuk suatu pola tertentu juga menggambarkan arah dan kecenderungan perkembangan wilayah itu sendiri.

Berdasarkan distribusi perbedaan tingkat perkembangan wilayah dan pola sebaran tingkat perkembangan wilayah yang terbentuk dilakukan pengkajian terhadap potensi dan permasalahan di Kabupaten Sragen digunakan untuk memberikan arahan pengembangan wilayah yang berdasarkan atas potensi dan permasalahan wilayah serta tingkat dan kecenderungan perkembangan wilayah dengan memperhatikan pula kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sragen.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Pola spasial perkembangan sosial ekonomi wilayah di kab. Sragen tahun 1990-2000
Dodi Widiyanto, Drs. R. Rijanta, M.Sc.; Andri Kurniawan, S.Si., M.Si.
Universitas Gadjah Mada, 2003 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/



Gambar 1.1. Diagram Alir Pemikiran

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Pola spasial perkembangan sosial ekonomi wilayah di kab. Sragen tahun 1990-2000
Dodi Widiyanto, Drs. R. Rijanta, M.Sc.; Andri Kurniawan, S.Si., M.Si.
Universitas Gadjah Mada, 2003 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

1.7. Hipotesa

Berdasarkan latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan tinjauan pustaka diajukan hipotesis sebagai berikut :

1. Terdapat perbedaan yang nyata tingkat perkembangan wilayah di Kabupaten Sragen,yaitu sebagian besar desa-desa yang terletak di Wilayah Kabupaten Sragen Bagian Selatan lebih berkembang dibandingkan dengan desa-desa yan terletak di Wilayah Kabupaten Sragen Bagian Utara.
2. Transportasi berhubungan terhadap tingkat perkembangan wilayah di Kabupaten Sragen.
3. Terjadi perubahan pola spasial perkembangan sosial ekonomi berdasarkan tingkat perkembangan sosial ekonomi tahun 1990 dan 2000 di Wilayah Kabupaten Sragen.

1.10. Batasan Operasional.

Pola Spasial adalah kekhasan distribusi tingkat perkembangan wilayah yang terdapat di Kabupaten Sragen beserta asosiasi dari setiap elemen-elemen yang terdapat didalamnya, meliputi variasi kondisi sosial ekonomi, transportasi dan sumberdaya manusia. Pola spasial yang terbentuk dapat dibedakan menjadi mengelompok, tersebar tidak merata, dan tersebar merata

Perkembangan Wilayah adalah suatu proses yang terjadi di suatu wilayah yang dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berinteraksi di wilayah tersebut pada kurun waktu tertentu.

Sosial Ekonomi Wilayah adalah suatu kondisi yang mencakup komponen-komponen sosio-budaya, kependudukan (demografi), dan ekonomi yang terdapat di suatu wilayah.

Wilayah adalah dacrah dengan batasan administrasi dan digunakan sebagai satuan perencanaan, seperti propinsi, kabupaten, kecamatan,, dan desa atau sebagai salah satu bentuk sumberdaya alam adalah wujud fisik lingkungan alam yang merupakan wujud fisik lingkungan dalam dimensi geografi dan geometri horizontal maupun vertikal yang meliputi daratan, lautan, dan udara beserta isi yang ada di dalamnya. (Izzat, 2000)

Pola spasial perkembangan sosial ekonomi wilayah di kab. Sragen tahun 1990-2000
Dodi Widiyanto, Drs. R. Rijanta, M.Sc.; Andri Kurniawan, S.Si., M.Si.
Universitas Gadjah Mada, 2003 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Kesenjangan adalah perbedaan tingkat perkembangan antarwilayah yang menyolok dikaitkan dengan azas pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya (Chehafuddin, 1999)

Kesenjangan antarwilayah adalah suatu kondisi yang tidak sama antar satu wilayah dengan wilayah yang lain dalam menikmati hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai (Dewanta, 1999). Dalam penelitian ini, kesenjangan antar wilayah digambarkan oleh tingkat perkembangan wilayah.

Tingkat perkembangan wilayah adalah tingkat perkembangan atau kemajuan yang dicapai oleh suatu wilayah apabila dibandingkan dengan wilayah lain.

Wilayah Bagian Utara adalah wilayah yang menurut fisiografinya berada di utara aliran Sungai Bengawan Sala (Poldas Kabupaten Sragen, 2000). Secara administrati wilayah bagian utara terdiri atas Kecamatan Kali Jambe, Plupuh, Gemolong, Tanon, Miri, Sumberlawang, Mondokan, Sukodono, Gesi, Tangen dan Jenar.

Wilayah Bagian Selatan adalah wilayah yang menurut fisiografinya berada di selatan aliran Sungai Bengawan Sala (Poldas Kabupaten Sragen, 2000). Secara administrati wilayah bagian selatan meliputi Kecamatan Masaran, Sidoharjo, Sragen, KarangMalang, Kedawung, Sambirejo, Ngrampal, Gondang, dan Sambungmacan